

**ABSTRAK**

**Syafruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Tahun 1948-1949.**

**Oleh : YF. DINA ROSA**

Skripsi yang berjudul “*Syafruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948-1949*”, memiliki tujuan untuk membahas serta menganalisa tiga permasalahan pokok, yaitu : (1) Mengapa Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI); (2) Bagaimana peranan Syafruddin Prawiranegara dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI); dan (3) Bagaimana dampak Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode sejarah yang mencakup; heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan sejarah sosial dan sejarah politik. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis.

Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia ternyata tidak membuat Belanda angkat kaki dari wilayah Republik Indonesia. Agar dapat menguasai wilayah Republik Indonesia, Belanda mengadakan perjanjian dengan bangsa Indonesia. Namun setiap perjanjian tersebut selalu dilanggar oleh Belanda. Salah satu perjanjian yang dilanggar oleh Belanda adalah Perjanjian Renville. Adanya agresi militer Belanda ke II terhadap kota Yogyakarta merupakan wujud dari pelanggaran terhadap Perjanjian Renville. Dengan adanya agresi militer Belanda II, maka kota Yogyakarta jatuh dan para pemimpin Republik ditawan oleh Belanda. Sebelum tertangkap, para pemimpin Republik sempat mengadakan sidang yang memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra untuk mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia.

Setelah mendengar berita bahwa kota Yogyakarta jatuh dan para pemimpin Republik Indonesia ditawan oleh Belanda, maka pada tanggal 22 Desember 1948 Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Halaban (Sumatra Barat). Bersama anggota PDRI lainnya di Sumatra, Syafruddin Prawiranegara bergerilya mengobarkan semangat rakyat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selama pemimpin PDRI bergerilya di Sumatra, ternyata Pemimpin Republik Indonesia yang ditawan oleh Belanda mengadakan perundingan kemabali dengan Belanda yang menghasilkan Persetujuan Roem –Royen. Dengan adanya Persetujuan Roem-Royen, maka Syafruddin Prawiranegara beserta pemimpin PDRI lainnya kembali ke Yogyakarta dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.

Meskipun Syafruddin Prawiranegara memimpin PDRI hanya beberapa bulan, yaitu mulai tanggal 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun telah memberikan banyak perubahan bagi bangsa Indonesia. Dengan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), maka Republik Indonesia masih tetap ada dan tidak hancur seperti yang dibayangkan oleh Belanda.

**ABSTRACT**

**SYARFUDDIN PRAWIRANEGARA LED THE EMERGENCY  
GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF INDONESIA 1948 – 1949**

**By:**

**Y.F. DINA ROSA**

The thesis titled “Syafuruddin Prawiranegara Led the Emergency Government of Indonesian Republic 1948-1949”. It had the purpose to discuss and analyze the three main problems, namely: (1) Why he built the emergency government in the Republic of Indonesian, (2) How the his role in the government, and (3) How the impact of building the government for the course of Indonesian to defense its Independence.

In the writing of this thesis, the method used was the historical including heuristic, critic of source, interpretation and historiography and the approach was the social and political history. While the writing was the descriptive analysis.

The Independence gained by Indonesia, in fact, it did not make the Dutch went away from the territory in the Republic of Indonesian. In order to dominate the territory, the Dutch held the agreement with Indonesia. However, every agreement always to be violated by the Dutch. One of the agreements was the agreement of Renville. The existence of Dutch’s military aggression II toward the city of Jogjakarta was the form of violation toward the agreement. With the existence of Dutch’s military aggression II so that the city of Jogjakarta was fallen and the leaders of the Republic was held out by the Dutch. Before they were captured, they had a chance to hold the session giving the mandate to Syafuruddin Prawiranegara being staying in Sumatra to build the emergency government in the Republic of Indonesia.

After hearing the news that the city of Jogjakarta was fallen and the leaders of Republic was held out by the Dutch, so on the December 22, 1948 Syarifuddin Prawiranegara formed the emergency government (PDRI) in Halaban (West Sumatra). Along with the other members in Sumatra, he waged to stir up people’s spirit from one place to the others. As long as the leader of PDRI waged in Sumatra, in fact, the other leaders of Republic held out by the Dutch holding the meeting back with the Dutch that resulted the agreement of Roem – Royen. With the existence of the agreement so Syafuruddin Prawiranegara along with the other leaders of PDRI returned to Jogjakarta and gave back the mandate to President Soekarno.

Although Syafuruddin Prawiranegara only led PDRI for several months, that was, starting on December 22 1948 to July 13 1949, however he had given a lot of changes for the Republic of Indonesia. By building the emergency government (PDRI), the Republic of Indonesia still remained exist and did not destroy as imagined by the Dutch.